

**PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILUKADA 2018
KABUPATEN SINJAI (STUDI KASUS DESA KOMPANG
KECAMATAN SINJAI TENGAH KABUPATEN SINJAI)**¹ M. Erwin Syukri¹Universitas Muhammadiyah Sinjai
¹erwin.syukri@yahoo.co.id

ABSTRACT

This study aims to determine the political participation of the Kompang village community in the post-conflict local election of Sinjai Regency 2018. The type of research is qualitative, data collection techniques are observation, interview and documentation. The informants consisted of the Kompang Village Head, the Kompang Village PPS Chair, the PPS Members who served in Kompang Village at the time of the 2018 election and the community who knew a lot about research. The data analysis technique was carried out by collecting data, simplifying data, presenting data and drawing conclusions. Based on the results of the research, it can be seen that the political participation of the Kompang village community in the 2018 Sinjai Regency post-conflict local election is a spectator. The political participation of the Kompang Village community in the 2018 Sinjai Regency post-conflict local election was not so apathetic, this is evidenced by almost as a whole the community has exercised their voting rights, even if there is an apathy it is due to compulsion due to busy work carried out outside the village which is far from the village where they voted, such as construction workers, garden workers, fishermen, there are also some residents, some of the residents of Kompang village also work in the sea following their skipper so they don't have time to come to exercise their voting rights. Meanwhile, for the spectator's attitude that is owned by the people of Kompang Village, this is proven by almost all people to use their voting rights, because the majority of people are farmers so most people only use their voting rights but are not involved in politics, the majority of their farmers are more likely to prioritize activities in the garden than political. Meanwhile, gladiatorial behavior is only minimal because gladiator attitudes are usually only from well-respected families such as Karaeng in Kompang Village, these people are still very influential, because the average citizen still sees from social status.

Keywords; Participation; Politics; Pemilukada 2018

A. PENDAHULUAN

Pemilihan umum kepala daerah secara langsung yang sering disebut sebagai pemilukada menjadi sebuah perjalanan sejarah baru dalam dinamika kehidupan

berbangsa di Indonesia. Perubahan sistem pemilihan mulai dari pemilihan legislatif, presiden dan wakil presiden, dan kepala daerah diharapkan mampu melahirkan kepemimpinan yang dekat dan menjadi idaman seluruh lapisan masyarakat (Hidayaturrahman & Ubaid, 2022) . Minimal secara moral dan ikatan dan pertanggungjawaban kepada konstituen pemilihnya yang notabene adalah masyarakat yang dipimpinnya.

Selain sebagai pembelajaran dan pendidikan politik langsung kepada masyarakat. Pilkada juga merupakan tonggak baru demokrasi di Indonesia (Nazaki et al., 2022). Bahwa esensi demokrasi adalah kedaulatan berada ditangan rakyat yang dimanifestasikan melalui pemilihan yang langsung dilakukan oleh masyarakat dan diselenggarakan dengan jujur, adil, dan aman.

Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2017 tentang Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dijelaskan bahwa untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan berbagai upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini menjadi materi pokok pengaturan partisipasi masyarakat dalam Peraturan Pemerintah ini sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala daerah di setiap daerah berbeda-beda, dan beragam, ada yang tingkat partisipasi masyarakatnya tinggi ada juga yang rendah, yang dipengaruhi status sosial, status ekonomi, dan afiliasi politik orang tua dan pengalaman berorganisasi (Asdar Maknung & Muhammad Ma'ruf, 2022). Pemilihan kepala daerah yang terjadi di berbagai daerah juga sarat dengan keadaan dan situasi politik yang ada di masing-masing daerah. Banyaknya politik aliran yang dianut oleh masyarakat juga ikut meramaikan situasi dalam proses

pemilukada, seperti halnya yang ada di desa Kompang kecamatan Sinjai Tengah kabupaten Sinjai, dimana masyarakatnya memiliki berbagai kepentingan dan harapan.

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki fungsi penting, antara lain sebagai sarana bagi masyarakat baik orang perseorangan, kelompok masyarakat, maupun organisasi kemasyarakatan dalam mengekspresikan kebutuhan dan kepentingannya sehingga proses pembentukan kebijakan daerah lebih responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Partisipasi masyarakat juga merupakan hal penting dalam mewujudkan kepedulian dan dukungan masyarakat untuk keberhasilan pembangunan di daerahnya (septiani, 2022).

Dari hasil observasi diketahui bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sinjai menjelang pelaksanaan tahapan pada bulan September terkait dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2018 yang akan datang terlihat mulai melakukan koordinasi dengan stake holder terkait dengan pendataan daftar pemilih tetap (DPT).

Muhammad Arsal, SE yang merupakan ketua KPU Sinjai mengatakan “bahwa berdasarkan Undang-undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2016, pemilih harus memiliki elektronik kartu tanda penduduk (e-KTP), untuk itu kita melakukan koordinasi dengan stake holder terkait yakni Dinas Catatan Sipil untuk membicarakan progresnya sebelum memasuki tahapan pilkada pada bulan september mendatang”.

Muhammad Kasim yang membidangi Divisi Perencanaan dan Data KPU Sinjai menjelaskan bahwa “mengenai data daftar pemilih tetap (DPT) dari jumlah penduduk di Sinjai berdasarkan data dari Dinas Catatan Sipil kabupaten Sinjai terdapat sebanyak 256.790 jiwa, wajib KTP 176.984, memiliki KTP elektronik sebanyak 160.439 atau 90,65 % sedangkan yang belum mempunyai e-KTP

sebanyak 16.545 atau 9,35 %. Mengacu pada DPT pilkada tahun 2014 lalu jumlahnya sebanyak 175.646, sedangkan untuk data DPT pilkada 2018 sesuai data yang diterima dari Dinas Catatan Sipil mengalami peningkatan 7000 lebih Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilih pemula.

Sesuai ketentuan Pasal 354 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam membentuk peraturan daerah mengenai tata cara partisipasi masyarakat. Partisipasi politik yang merupakan wujud pengejawantahan kedaulatan rakyat adalah suatu hal yang sangat fundamental dalam proses demokrasi. Apabila masyarakat memiliki tingkat partisipasi yang tinggi, maka proses pembangunan politik dan praktik demokratisasi di Indonesia akan berjalan dengan baik (saleh, 2022).

Perwujudan demokrasi di tingkat lokal, salah satunya adalah dengan melaksanakan pemilukada di daerah-daerah. Sebagaimana pesta demokrasi (pemilukada) di Kabupaten Sinjai yang dilaksanakan pada tahun 2018 kemarin. Namun, tidak semua perwujudan demokrasi itu berjalan dengan lancar. Masih banyak polemik mengenai partisipasi masyarakat bawah yang dapat mempengaruhi proses pemilihan. Kecenderungan masyarakat terhadap uang (money politic) dapat berdampak pada menurunnya tingkat partisipasi masyarakat untuk menentukan pilihan politiknya. Sehingga ketika tidak ada uang, maka golput menjadi suara mayoritas.

Tabel 1.1 Daftar Pemilih Kepala Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018

No	Kecamatan	Pemilih	
		L	P
1	Sinjai Barat	8.783	9.002
2	Sinjai Selatan	13.641	14.554
3	Sinjai Timur	11.186	11.967
4	Sinjai Tengah	9.761	10.054

5	Sinjai Utara	13.844	15.374
6	Bulupoddo	6.114	6.503
7	Sinjai Borong	6.607	6.411
8	Tellulimpoe	12.871	13.629
9	Pulau Sembilan	2.567	2.677
Jumlah		85.374	90.171

Sumber: kpu.go.id

Hal ini sebagaimana yang terjadi di desa Kompang pada pemilu pada tahun 2018 yang lalu. Masyarakat desa Kompang dalam kehidupan sehari-harinya hanya bertani dan cenderung apatis terhadap politik. Dalam artian kesadaran politik mereka masih terlihat rendah. Hal ini bisa dilihat dengan ditemukannya praktik *money politic*, dimana calon yang memberikan uang lebih banyak, maka itulah yang dipilih. Dan jika tidak ada calon yang memberikan uang, mereka lebih memilih untuk golput. Fenomena yang demikian, tentu akan berdampak atau berpengaruh terhadap tinggi rendahnya partisipasi masyarakat desa Kompang dalam pemilu Kabupaten Sinjai.

Oleh karena itu, partisipasi mereka sangat penting untuk ditilik guna mengetahui seberapa jauh partisipasi mereka dalam mengawal pemilu kabupaten Sinjai. Kesadaran politik yang tinggi tentunya sangat diharapkan. Jika partisipasi mereka tinggi maka kesadaran politik mereka juga tinggi, namun jika partisipasi mereka rendah, tentunya kesadaran politik mereka juga rendah.

B. METODE

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa,

pada suatu konteks khusus yang ilmiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Metode kualitatif digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, penyelesaian masalah akan lebih muda apabila berhadapan dengan kenyataan yang ganda. Kedua, metode ini menggunakan secara langsung hakikat hubungan antar peneliti dan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri terhadap pola-pola yang dihadapi.

Adapun lokasi yang menjadi objek penelitian ini adalah di Desa Kompang Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai, dengan teknik pengumpulan data yakni Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Adapun Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa dan Masyarakat Desa Kompang, Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Kompang, dan Anggota PPS Desa Kompang dengan teknik analisis data yakni pengumpulan Data, Reduksi data, penyajian data dan Penarikan Kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana pesta demokrasi seperti pemilihan umum kepala daerah di kabupaten Sinjai yang dilaksanakan pada tahun 2018. Namun, tidak semua perwujudan demokrasi itu berjalan dengan lancar. Masih banyak polemik mengenai partisipasi masyarakat bawah yang dapat mempengaruhi proses pemilihan. pemilihan kepala daerah secara langsung sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat, dan kinerja panitia yang telah ditetapkan oleh KPUD yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Partisipasi masyarakat merupakan kunci dari proses Pemilihan Kepala Daerah secara langsung. Adapun beberapa

partisipasi politik masyarakat terbagi beberapa kategori, yakni *apatitis*, *spectator*, *gladiator*.

1. Apatitis

Apatitis adalah merasa acuh tak acuh, dalam hal ini masyarakat yang apatis yang tidak mau menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2018 khususnya di Desa Kompang Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa partisipasi politik masyarakat Desa Kompang dalam pemilu 2018 Kabupaten Sinjai tidak begitu apatis hal ini dibuktikan dengan hampir secara keseluruhan masyarakat telah menggunakan hak pilihnya, walaupun ada sikap apatis itu disebabkan karena keterpaksaan akibat kesibukan pekerjaan yang dilakukan di luar desa yang jaraknya jauh dari desa tempat memilih, seperti buruh bangunan pekerja kebun, nelayan juga ada beberapa warga, sebagian dari warga desa kompang juga ada yang berkerja di laut mengikuti juragan mereka sehingga mereka tidak sempat hadir untuk menggunakan hak pilihnya. Pernyataan ini sesuai dengan penjelasan Milbart dan Goel (dikutip dalam Surbakti Ramlan, 2007: 143) bahwa apatis merupakan kelompok orang yang tidak peduli terhadap sesuatu yang berhubungan dengan politik, mereka tidak memberikan sedikitpun terhadap masalah politik, sikap politik seseorang terhadap suatu objek politik yang terwujud dalam tindakan atau aktivitas politik merupakan perilaku politik seseorang.

Hal tersebut didukung juga dari hasil pengamatan lapangan bahwa jumlah pemilih pada pemilihan umum kepala daerah tahun 2018 berjumlah 1489 untuk desa Kompang kecamatan Sinjai Tengah. Untuk lebih jelasnya berikut penulis tampilkan rincian jumlah pemilih.

Tabel 1 . Jumlah Pemilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah

No	No TPS	Jumlah Pemilih		
		L	P	L+P
1	001	137	167	304
2	002	151	147	298
3	003	154	1141	295
4	004	157	138	295
5	005	142	155	297
Total		741	748	1489

Sumber: Ketua PPS Desa Kompang. 2020

2. Spectator

Spectator artinya masyarakat yang ikut menggunakan hak pilihnya, berpartisipasi dengan hanya ditunjukkan dengan memilih pada saat pemilukada 2018.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat Desa Kompang dalam pemilukada Kabupaten Sinjai 2018 termasuk dalam *spectator* yaitu masyarakat ikut menggunakan hak pilihnya, berpartisipasi dengan hanya ditunjukkan dengan memilih pada saat Pemilukada 2018. Sikap *Spectator* ini cukup banyak kerana masyarakat mayoritas petani jadi kebanyakan masyarakat hanya menggunakan hak pilihnya tapi tidak terlibat dalam politik, masyarakat mayoritas petani mereka lebih cenderung mementingkan kegiatan di kebun dari pada politik. Pernyataan ini sesuai dengan penjelasan Milbart dan Goel (dikutip dalam Surbakti Ramlan, 2007: 143) *Spectator* merupakan orang yang setidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum contohnya orang yang terlibat dalam diskusi politik dan pemerhati dalam pembangunan politik.

Hal itu juga didukung oleh hasil pengamatan dilapangan bahwa terdapat laporan hasil cokit PPDP atau Petugas Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW) yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih pada pemilihan

epala daerah di desa Kompang kecamatan Sinjai Tengah merinci jumlah data mula dari TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005.

Tabel 2 . Jumlah Pemilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah

No	Nomor TPS	Jumlah
1	001	303
2	002	292
3	003	299
4	004	286
5	005	297

Sumber : Ketua PPS Desa Kompang, 2020

Dari data tersebut dapat dilihat dianalisis bahwa masih banyak pemilih yang seharusnya mereka melakukan pemilihan sebagaimana undangan yang telah diberikan namun mereka tidak menghadiri karena lebih cenderung untuk melaksanakan aktivitas keseharian mereka. Yang pada dasarnya mereka butuh pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam pemilihan umum.

3. Gladiator

Gladiator artinya mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni masyarakat terlibat aktif dalam politik dengan jumlah yang sedikit namun memiliki pengaruh yang sangat besar khususnya di Desa Kompang Kecamatan Sinjai Tengah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat desa Kompang dalam pemilu pada kabupaten Sinjai 2018 tidak berperilaku gladiator karena mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik hanya dalam jumlah yang sedikit yang mana rata-rata hanya anggota partai dibanding dengan yang bersikap *spectator*. Ciri-ciri pelaku politik di desa Kompang biasanya dari kalangan

keluarga yang terpandang misalnya Karaeng, orang-orang ini masih sangat berpengaruh, karena rata-rata warga masih melihat dari status sosial. Pernyataan ini sesuai dengan penjelasan Milbart dan Goel (dikutip dalam Surbakti Ramlan, 2007: 143) *Gladiator* merupakan orang yang secara aktif terlibat dalam proses politik, contohnya orang-orang yang selalu aktif terlibat dalam proses politik seperti pejabat publik atau calon pejabat publik dan para fungsionaris partai politik atau kelompok kepentingan yang mengurus organisasi secara penuh waktu.

D. SIMPULAN

Hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa partisipasi politik masyarakat desa Kompang dalam pemilukada Kabupaten Sinjai 2018 bersifat *spectator*.

Partisipasi politik masyarakat desa Kompang dalam pemilukada kabupaten Sinjai 2018 tidak begitu apatis hal ini dibuktikan dengan hampir secara keseluruhan masyarakat telah menggunakan hak pilihnya, walaupun ada sikap apatis itu disebabkan karena keterpaksaan akibat kesibukan pekerjaan yang dilakukan di luar desa yang jaraknya jauh dari desa tempat memilih, seperti buruh bangunan pekerja kebun, nelayan juga ada beberapa warga, sebagian dari warga desa kompang juga ada yang berkerja di laut mengikuti juragan mereka sehingga mereka tidak sempat hadir untuk menggunakan hak pilihnya.

Sementara untuk sikap *spectator* dimiliki oleh masyarakat desa Kompang hal ini dibuktikan dari hampir semua masyarakat ikut menggunakan hak pilihnya, kerena masyarakat mayoritas petani jadi kebanyakan masyarakat hanya menggunakan hak pilihnya tapi tidak terlibat dalam politik, masyarakat mayoritas petani mereka lebih cenderung mementingkan kegiatan di kebun dari pada politik.

Partisipasi politik masyarakat desa Kompang dalam pemilukada Kabupaten Sinjai 2018 tidak berperilaku gladiator karena mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik hanya dalam jumlah yang sedikit yang mana rata-rata hanya anggota partai dibanding dengan yang bersikap *spectator*. Ciri-ciri pelaku politik di Desa Kompang biasanya dari kalangan keluarga yang terpandang misalnya Karaeng, orang-orang ini masih sangat berpengaruh, karena rata-rata warga masih melihat dari status sosial.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka selaku peneliti mengharapkan: 1. agar pemerintah desa dan okoh Politik melakukan kegiatan pendidikan politik bagi masyarakat sehingga masyarakat tidak acuh tak acuh terhadap kegiatan pemilihan kepala desa hal ini berguna untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik; 2. sertiap elemen yang berkepentingan pada politik melakukan sosialisasi secara *door to door* terkait pentingnya pelaksanaan pemilu khususnya masyarakat yang tinggal di pedalaman sehingga mereka merasa penting untuk memberikan suaranya dalam kegiatan pemilu; 3. Partai politik melakukan upaya meminimalisir politik kekerabatan dengan membangun mutalisme antara partai politik dengan masyarakat yang mana partai merekrut kandidat yang berkualitas secara demokratis dan masyarakat cerdas memilih kandidat yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

Asdar Maknung, M., & Muhammad Ma'ruf, A. (2022). PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) KONAWE UTARA. *Parabela: Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal*, 2(1), 34–43. <https://doi.org/10.51454/parabela.v2i1.505>

Emzir. 2012. Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif. Cetakan 3. Jakarta : Rajawali Pers.

- Hidayaturrahman, M., & Ubaid, A. H. (2022). Peran Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Bagi Warga Kepulauan Madura. *Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service)*, 4(3), 322–329. <https://doi.org/10.36312/sasambo.v4i3.745>
- Nazaki, N., Handrisal, H., Satyagraha Adiputra, Y., Kustiawan, K., Winarti, N., Rahmi, K., Afnira, E., Pratama, R. A., Rahmawati, N., Adhayanto, O., Okparizan, O., Martha, E., Kukun, S. L., Lestari, S., & Intiham, F. (2022). PENDIDIKAN POLITIK: MAHASISWA, PEMILU 2024 DAN PEMILU YANG BERKUALITAS. *Takzim: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 30–35. <https://doi.org/10.31629/takzimjpm.v2i1.4451>
- saleh, M. (2022). PARTISIPASI POLITIK (SEBUAH ANALISA PEMILUKADA PADA MASA PENDEMI COVID). *Journal Ilmiah Rinjani: Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani*, 10(1), 146–159. <https://doi.org/10.53952/jir.v10i1.382>
- septiani, I. (2022). Partisipasi Masyarakat Terhadap Kebijakan Politik Teknokratis. *OSF Preprints*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/2n5we>
- Surbakti, Ramlan. 2007. Memahami Ilmu Politik, Jakarta: PT. Gramedia Widisarana Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1982 Tentang Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda